

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penggunaan istilah negara berkembang dan negara maju mulai diperkenalkan pada tahun 1960 oleh organisasi internasional yang bernama *Organization of Economy Development* (OECD). Menurut *Organization of Economy Development* (OECD) sekitar 80 – 85 persen negara di dunia merupakan negara berkembang sementara hanya 15 – 20 persen selebihnya merupakan negara maju (Myrdal, 1974). Pada artikel *New Palgrave : A Dictionary of Economics yang ditulis* (Bell, 1950) negara maju dikatakan sebagai “pionir” sementara untuk negara berkembang dikatakan sebagai negara “perintis” indikator suatu negara dapat dikatakan sebagai negara “pionir” atau “perintis” adalah tingkat pendapatan negara itu sendiri.

Menurut (Nielsen, 2011) kondisi di bidang ekonomi dan sosial suatu negara seperti kesehatan, nutrisi, pekerjaan, tempat tinggal, dan pendidikan merupakan cerminan secara umum suatu negara mengenai kondisi negara tersebut. Dengan menghitung biaya standar kehidupan ekonomi minimum, maka diperlukan pendapatan minimum untuk memenuhi biaya standar kehidupan tersebut. Individu atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi biaya standar kehidupan ekonomi minimum tersebut dikategorikan sebagai kelompok masyarakat kurang mampu atau masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Sementara penduduk yang mampu memenuhi biaya standar kehidupan ekonomi dikategorikan sebagai kelompok masyarakat mampu.

*United Nations Development Programme* (UNDP) melakukan pengelompokan negara maju ataupun negara berkembang berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) dimana indeks pembangunan manusia ini merupakan gabungan dari tiga indeks yang mengukur pencapaian suatu negara dalam hal harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan. Untuk ukuran pendapatan yang digunakan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pendapatan nasional bruto per kapita dengan estimasi mata uang lokal suatu negara yang dikonversikan ke dalam mata uang dollar Amerika Serikat (US\$).

Perserikatan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) menyusun tiga konsep lini dasar dengan agenda (*triple line bottom*) yaitu people (manusia), planet (lingkungan), profit (ekonomi) yang tertuang dalam dokumen “*Our Common Future*” (Fonseca et al., 2020). Perserikatan Bangsa – Bangsa

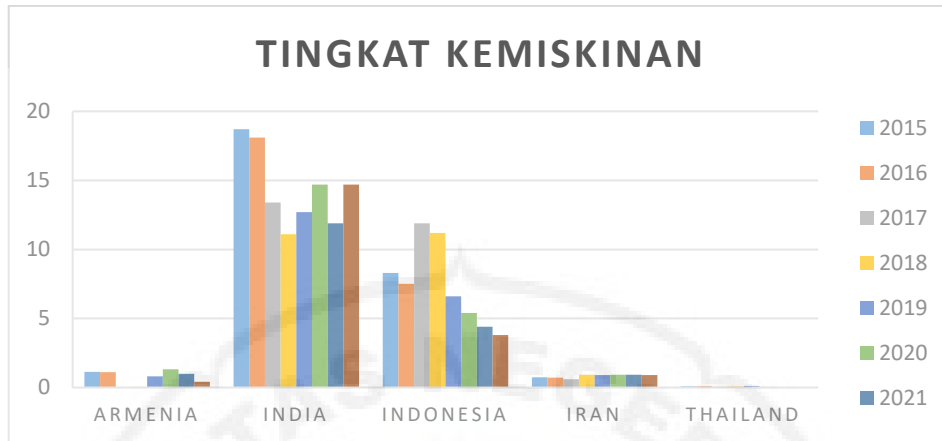
Pada bulan September tahun 2015, Perserikatan Bangsa – Bangsa menguraikan visi transformatif untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup dengan harapan pada tahun 2030 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut Perserikatan Bangsa – Bangsa menyusun indikator – indikator yang harus dipenuhi oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa yang tertuang dalam “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*” (United Nations, 2018).



**Gambar 1.1 Sustainable Development Goals**

Perserikatan Bangsa – Bangsa menyatakan dalam “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*” terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk dipenuhi oleh setiap negara di dunia. Secara jangka panjang tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) diharapkan mampu membuat setiap negara menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan melalui keterlibatan semua sektor di suatu negara. Perserikatan Bangsa – Bangsa mengharapkan setiap negara di dunia memberikan kebijakan yang dapat berkontribusi dan berintegrasi bagi keberlanjutan saat ini dan masa depan (Fonseca et al., 2020).

Satu dari lima orang di wilayah negara berkembang masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 US\$ per hari dan masih ada jutaan orang lainnya yang berpenghasilan kurang dari jumlah tersebut. Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa, kemiskinan lebih dari sekedar kurangnya pendapatan dan kurangnya mata pencaharian namun juga meliputi kelaparan, kekurangan gizi, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.



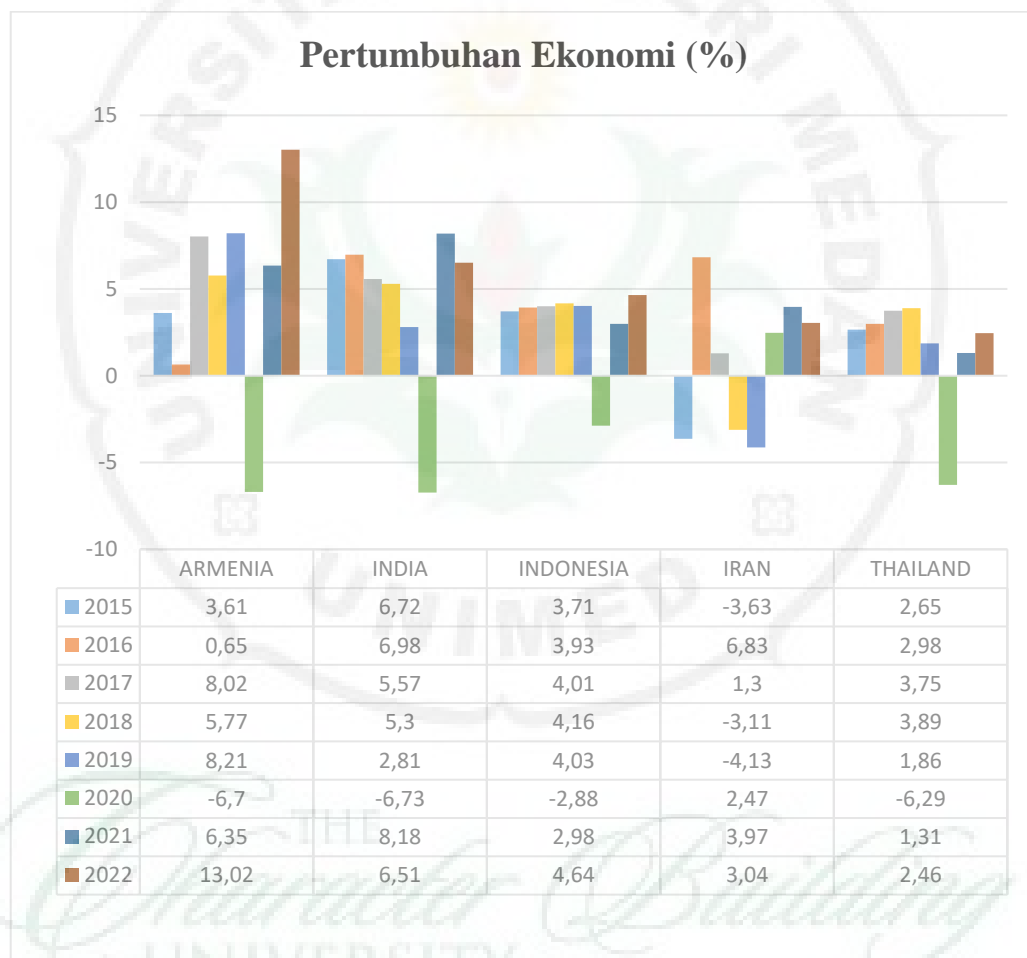
**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi persoalan penting di setiap negara. Khususnya pada negara – negara berkembang di Asia. Pada gambar 1.2 negara – negara berkembang di Asia yang digunakan adalah Armenia, India, Indonesia, Iran, dan Thailand. Thailand menjadi negara dengan tingkat kemiskinan yang rendah apabila dibandingkan dengan negara – negara lainnya.

Kemiskinan masih menjadi hambatan terbesar dalam proses pembangunan karena ketidakmampuan penduduk untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Ma'ruf & Aryani, 2019). Masalah kemiskinan, masyarakat yang terpinggirkan dan meningkatnya pengangguran pada dasarnya harus menjadi pusat perhatian dalam proses kemajuan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, masalah ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas (Andrian et al., 2021).

Untuk itu, Bank Dunia menetapkan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 dan meningkatkan kemakmuran bagi 40% masyarakat berpenghasilan terendah di setiap negara melalui pengurangan ketimpangan pendapatan (Omar & Inaba, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan instrumen yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai strategi pengentasan kemiskinan yang berhasil haruslah memiliki langkah-langkah utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan (Rodrik, 2007).



**Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di negara – negara berkembang melambat pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebab dari perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan adanya wabah covid – 19 yang berakibat pada negara – negara berkembang tersebut.

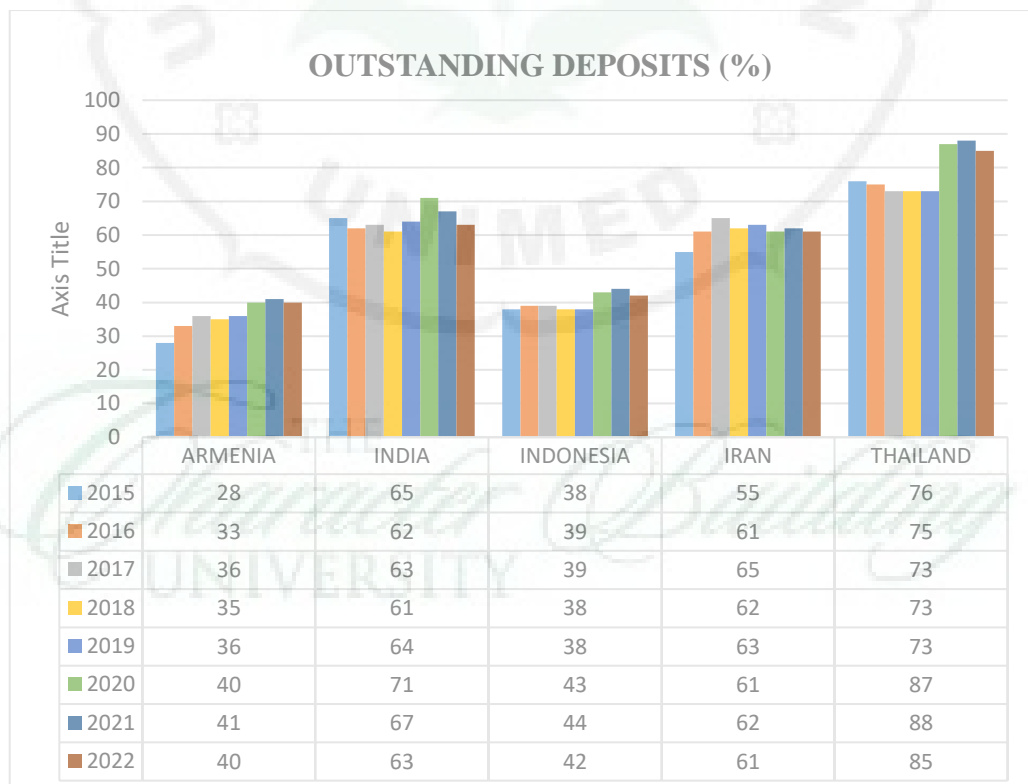
Salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang perekonomian adalah inklusi keuangan (*financial inclusion*). Inklusi keuangan (*financial inclusion/FI*) telah menjadi tujuan penting, terutama dengan munculnya ekonomi digital dan perubahan dalam industri teknologi keuangan (*financial technology/fintech*) (Singh & Stakic, 2021). Inklusi keuangan (*financial inclusion*) adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilisasi sistem keuangan (Andrian et al., 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir topik mengenai inklusi keuangan telah menarik perhatian para akademisi, legislator, dan regulator di negara – negara berkembang. Inklusi keuangan diharapkan mampu membantu perluasan jaringan keuangan diharapkan dapat mencapai pergerakan arus keuangan yang efisien serta melintasi batas – batas negara serta diharapkan mampu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Van et al., 2021).

Pembahasan mengenai inklusi keuangan muncul karena rendahnya akses keuangan oleh masyarakat yang diakibatkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai keuangan dan perbankan, biaya administrasi bank yang dinilai tinggi, serta jangkauan bank yang jauh dari pemukiman penduduk. Topik mengenai inklusi keuangan ini telah menjadi agenda tahunan yang dibahas dalam forum internasional seperti G20, AFI, APEC, ASEAN, dan OECD.

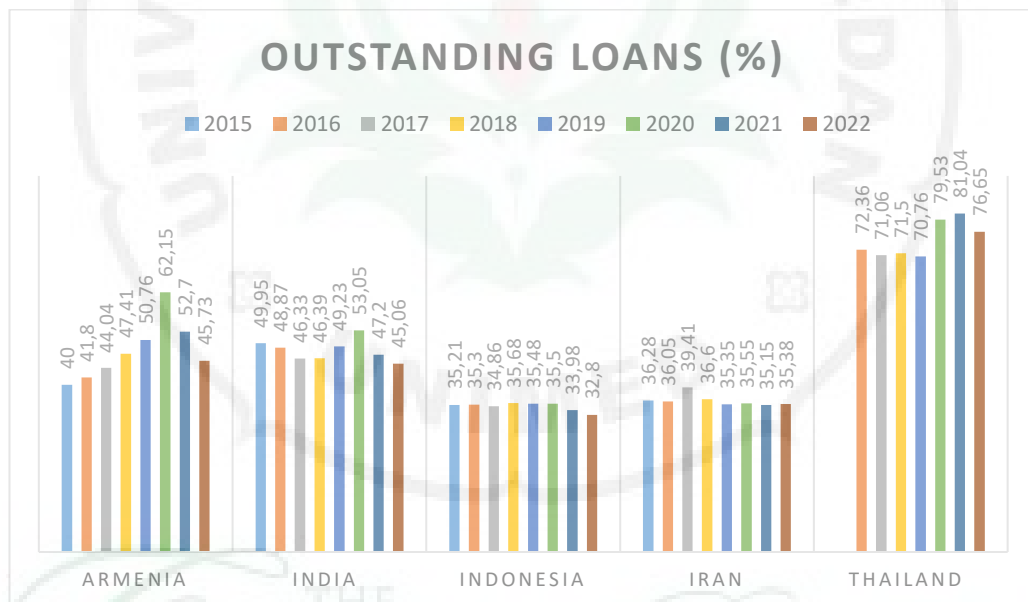
Tujuan dari strategi inklusi keuangan ini adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan, mengatasi masalah kemiskinan, dan mendorong pemerataan pendapatan (Ma'ruf & Aryani, 2019).

Pada edisi 2017 *global findex* menyatakan bahwa koneksi internet dan penggunaan ponsel mampu menciptakan peluang untuk menurunkan persentase orang dewasa yang tidak memiliki rekening bank sementara bagi orang dewasa yang sudah memiliki rekening bank diharapkan dengan adanya teknologi digital untuk melakukan lebih banyak transaksi keuangan secara rutin. Sistem keuangan yang kuat, infrastruktur fisik yang memadai, peraturan yang sesuai disusun oleh pemerintah serta perlindungan konsumen yang kuat (Demirgüç-Kunt et al., 2020).



**Gambar 1.4 Outstanding Deposits**

Dibandingkan dengan negara – negara lainnya seperti Armenia, India, Indonesia dan Iran negara Thailand memiliki nilai *outstanding deposit* yang cukup besar. Di tahun 2015 negara Thailand memiliki nilai *outstanding deposit* sebesar 76% lalu di tahun 2016 mengalami penurunan nilai *outstanding deposit* 75%, namun selama tiga tahun berturut – turut dimulai dari tahun 2017, 2018, 2019 tingkat *outstanding deposit* sebesar 73% lalu mengalami peningkatan yang cukup pesat sebesar 87% dan di tahun 2021 mengalami peningkatan nilai *outstanding deposit* sebesar 88% dan di tahun 2022 mengalami penurunan nilai *outstanding deposit* sebesar 85%.



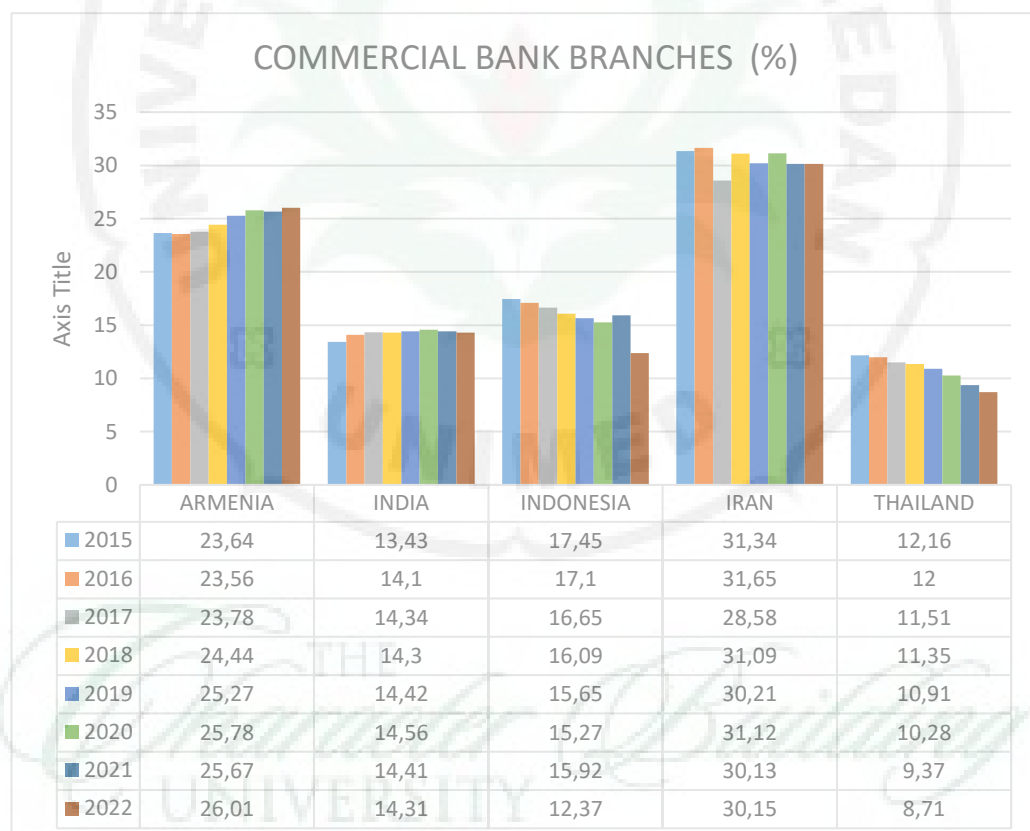
**Gambar 1.5 Outstanding Loans**

Thailand menjadi negara asia berkembang pertama dengan nilai *outstanding loans* yang cukup tinggi dimana pada tahun 2015 memiliki nilai 72,26% lalu untuk tahun – tahun selanjutnya nilai *outstanding loans* pada negara ini semakin menurun dan pada tahun 2020 dimana pada tahun sebelumnya merupakan tahun pandemi covid-19 nilai *outstanding loans* negara Thailand sebesar 79,53% mengalami peningkatan kembali tahun 2021 menjadi nilai *outstanding loans* tertinggi negara



Thailand 81,04% dan ketika pandemic covid-19 sudah hilang nilai *outstanding loans* menurun menjadi 76,65%.

Sementara itu nilai *outstanding loans* pada negara India pada tahun 2015 sebesar 49,95% dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan nilai *outstanding loans* sebesar 53,05% sementara untuk dua tahun selanjutnya negara India mengalami penurunan nilai *outstanding loans* lalu untuk negara Armenia memiliki nilai *outstanding loans* yang cukup besar pada tahun 2020 yaitu 62,15% dimana pada tahun 2020 tersebut merupakan tahun pemulihan setelah pandemic covid-19.



**Gambar 1.6 Commercial Bank Branches**

Iran merupakan negara dengan perolehan jumlah kantor cabang bank yang tiap tahun semakin meningkat dimulai pada tahun 2015 dengan perolehan 31,34% lalu semakin meningkat di tiap tahunnya, jumlah kantor cabang bank paling banyak

terjadi pada tahun 2018. Sementara pada negara Armenia juga memiliki jumlah kantor cabang bank tertinggi kedua setelah negara Iran. Pada tahun 2015 negara Armenia memiliki jumlah kantor cabang bank senilai 23,64% peningkatan jumlah kantor cabang bank di negara Armenia dimulai pada tahun 2019 sejumlah 25,27% dan terus meningkat di tahun – tahun berikutnya.

Berdasarkan paparan diatas, kondisi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan di setiap negara berbeda – beda. Untuk itu pada penelitian ini judul yang akan dibahas adalah “Peran Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Negara Berkembang di Asia”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Satu dari lima orang di wilayah negara berkembang masih hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 US\$ per hari dan masih ada jutaan orang lainnya yang berpenghasilan kurang dari jumlah tersebut.
2. Kemiskinan masih menjadi persoalan penting di setiap negara. Khususnya pada negara – negara berkembang di Asia.
3. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan mendorong kesetaraan individu
4. Inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peran inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia. Penelitian ini dilakukan terhadap negara berkembang di Asia yaitu Armenia, India, Indonesia, Iran dan Thailand. Pengambilan data dalam variabel penelitian ini dilakukan pada *website International Monetary Fund* dan *World Bank* serta rentang waktu pengambilan sampel dilakukan mulai tahun 2015 sampai dengan 2022.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah kantor cabang bank (*commercial bank branches*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia ?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pinjaman (*outstanding loan*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah simpanan (*outstanding deposit*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia ?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa pengaruh jumlah kantor cabang bank (*commercial bank branches*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia.
2. Menganalisa pengaruh jumlah pinjaman (*outstanding loan*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia.

3. Menganalisa pengaruh jumlah simpanan (*outstanding deposit*) terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia.
4. Menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan pada negara berkembang di Asia.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Universitas Negeri Medan**

Diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan mengenai topik penelitian peran inklusi keuangan dalam kemiskinan di negara berkembang Asia.

#### **2. Bagi Praktisi**

Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan mengenai topik penelitian peran inklusi keuangan dalam kemiskinan di negara berkembang Asia.

